

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA LEGISLATIF
DAERAH TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL
*MODERATING***

(Penelitian pada DPRD Kabupaten Sukabumi)

Aristanti Widyaningsih

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI

Jl. Dr. Setiabudhi 229. Bandung 40154 Jawa Barat

Tlp. +62222001619, HP. +6282116661825

e-mail: aristantiw@yahoo.com, aristantiw@gmail.com

Imaniar Pujirahayu

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan dan Bisnis UPI

Jl. Dr. Setiabudhi 229. Bandung 40154 Jawa Barat

Tlp. +62222001619, e-mail: egina_14@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga untuk menguji apakah variabel akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan APBD. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik *non probability sampling* di dalam pengumpulan data. Data diperoleh dengan melakukan survey terhadap 26 orang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana dan analisis persamaan regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan APBD. Namun untuk hipotesis kedua ditolak karena hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memperkuat pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kata Kunci: Pengetahuan anggaran, akuntabilitas, pengawasan keuangan daerah.

Abstract

This research aims to examine the influence of knowledge of local legislative about the budget for budget oversight, but also to test whether accountability can moderate the influence of the variable knowledge of local legislators about the budget to control the budget.

This study is an empirical study with non-probability sampling techniques in data collection. Data obtained by conducting a survey of 26 people Sukabumi district legislature Budget Agency. The data analysis using simple linear regression and analysis of regression equations moderation (Moderated Regression Analysis/MRA). The results of hypothesis testing indicate that there are positive and significant between the knowledge local about the budget member of the legislative budget oversight. But for the second hypothesis was rejected because the results showed that accountability does not strengthen the influence of knowledge of local legislators about the budget to the oversight of the budget revenue and expenditure.

Keywords: *Budgeting knowledge, accountability, local finance ascendant.*

PENDAHULUAN

Diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah telah diikuti dengan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah yang diikuti pula dengan pelimpahan dana. Pelimpahan dana ini diikuti dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah (Halim, 2003). Reformasi penganggaran yang terjadi menurut Mardiasmo (2003) adalah munculnya paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Di samping itu, anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*), prinsip efisien dan efektif (*value for money*), keadilan dan kesejahteraan dan sesuai dengan disiplin anggaran

Keberhasilan dari sebuah organisasi bisa diukur dari anggaran, karena beberapa kegunaan dari anggaran antara lain sebagai perencanaan strategis, membantu mengkoordinasi kegiatan dari beberapa bagian organisasi, memberi tanggung jawab kepada manajer dan sebagai evaluasi kinerja (Govindarajan, 2005). Dalam konteks penggunaan anggaran sebagai evaluasi kinerja, anggaran merupakan tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya (dalam bentuk program kerja dan kegiatan).

Pramono (2002) menjelaskan bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh anggota legislatif daerah yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh anggota legislatif daerah, yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif daerah, di antaranya adalah adanya akuntabilitas.

Pelaksanaan reformasi anggaran yang mengedepankan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi memerlukan *internal control* dan *external control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dikatakan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dewan mengenai anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Andriani (2002), Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya

semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Sementara Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana.

Penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) menyebutkan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan maupun sample masyarakat. Hubungan yang di tunjukkan adalah negatif artinya semakin tinggi akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan semakin menurun. Sedangkan penelitian Coryanata (2007) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan.

Penelitian ini menguji kembali penelitian yang dilakukan Coryanata (2007). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada sampel dan unit analisis, di mana peneliti terdahulu menggunakan 2 sampel yaitu sampel dewan dan sampel masyarakat sebagai reponden, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel dewan sebagai responden dengan alasan waktu dan luasnya wilayah penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah?
2. Apakah akuntabilitas memperkuat pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah?

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah tentang Anggaran

Pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran yaitu mengetahui tentang anggaran dan kemampuan Dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudono, 2002). Adisasmita (2011) mengatakan bahwa kemampuan kerja aparatur memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan keahliannya. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan aparatur selalu diarahkan pada pendidikan dan pelatihan serta memperluas pengalaman aparatur melalui studi-studi banding ke tempat lain.

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur adalah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan aspek-aspek seperti a). Pengembangan dan kemampuan melaksanakan tugas dan peraturan sebagai aparatur pemerintah, sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditentukan untuk suatu tugas tertentu dan mampu mengambil keputusan secara mandiri dan profesional, b). Peningkatan motivasi, disiplin, kejujuran, etos kerja dan rasa tanggungjawab yang dilandasi oleh semangat jiwa pengabdian dan, c). Perubahan sikap dan perilaku yang mengarah pada berkembangnya keterbukaan, sikap melayani dan mengayomi publik sebagai tugas dan tanggung jawab pokoknya (Kristiadi, 1991, dalam Adisasmita, 2011).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan ungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardismo, 2001). Menurut Sulistoni (2003) pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu Pengawasan yang diperlukan pada setiap tahap, dikarenakan pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2001). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga pengawasan diadakan dengan maksud: (Adisasmita, 2011)

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan anggaran (*budget*) yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

4. Mengetahui rencana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah tentang Anggaran terhadap APBD

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak (Indriantoro dan Supomo, 1999). Sedangkan, Salim (1991) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Ketiganya memengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960).

Ada beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya di antaranya dilakukan oleh Indradi (2001), dan Sutarnoto (2002). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Kemudian penelitian Andriani (2002) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Sopanah dan Mardiasmo (2003) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah tentang Anggaran terhadap APBD dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating

Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik. Sedangkan reformasi anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, memerlukan *internal control* dan *external control* yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut peran dewan menjadi semakin penting dalam mengontrol kebijakan pemerintah (Sopannah, 2003).

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, di antaranya adalah akuntabilitas (Pramono, 2002). Penelitian Coryanata (2007), menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan APBD dimoderasi oleh akuntabilitas. Hipotesis yang dikembangkan

berdasarkan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

H₂: Pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimoderasi oleh variabel akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampling, dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta untuk mengetahui akuntabilitas sebagai variabel yang memoderasi pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Populasi pada penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sukabumi badan anggaran yang berjumlah 26 orang. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi menjadi responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Definisi dan operasionalisasi variabel dari masing-masing variabel yang diteliti disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran	Mengetahui tentang anggaran dan kemampuan Dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudono, 2002).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tatacara pelaksanaan APBD. 2. Memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan terkait. 3. Mendeteksi serta identifikasi terhadap pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran 	Ordinal
Akuntabilitas	Kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan ungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mardismo (2001)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban Pemerintah secara terbuka, menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat. 2. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. 3. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. 4. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik. 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. 	Ordinal
Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Pengawasan diperlukan pada setiap tahap, dikarenakan pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2001)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan saat penyusunan. 2. Pengawasan saat pengesahan. 3. Pengawasan saat pelaksanaan. 4. Pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran. 	Ordinal

Metode Analisis Data

Uji validitas dilakukan dengan uji homogenitas data, yaitu dengan melakukan uji korelasi antara skor item-item pertanyaan dengan skor total (*Pearson Correlation*). Masing-masing item pertanyaan harus berkorelasi positif terhadap skor total pada tingkat signifikansi 1%. Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Uji reliabilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel.

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang mendasari model analisis regresi, yaitu pengujian multikolinieritas dengan menggunakan

nilai *tolerance* dan VIF; pengujian heteroskedastisitas dengan nilai mutlak residual menggunakan korelasi Rank Spearman; pengujian normalitas dengan menggunakan *normal probability plot*. Untuk pengujian hipotesis 1 menggunakan regresi linier sederhana dan untuk hipotesis 2 menggunakan analisis persamaan regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif dan Uji Kualitas Data

Untuk melengkapi data tentang karakteristik responden, berikut disajikan data deskriptif dalam Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Responden

	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin:		
	Laki-laki	26	100,00
	Total	26	100,00
2.	Usia:		
	≤ 30 tahun	0	0,00
	> 30 tahun	26	100,00
	Total	26	100,00
3.	Pendidikan Terakhir:		
	SMA/ sederajat	6	23,07
	D3	3	11,54
	S1	14	53,85
	S2	3	11,54
	Total	26	100,00

Sumber: Data Penelitian (diolah kembali)

Uji validitas dilakukan dengan uji homogenitas data, yaitu dengan melakukan uji korelasi antara skor item-item pertanyaan dengan skor total (*Pearson Correlation*). Masing-masing item pertanyaan harus berkorelasi positif terhadap skor

total pada tingkat signifikansi 1%. Hasil pengujian validitas menunjukkan nilai koefisien korelasi antar item-item pertanyaan, secara statistik, signifikan pada tingkat 1%. Hal ini menunjukkan instrumen tersebut dinyatakan valid (Tabel 3).

Uji reliabilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Menurut Nunnally (1978) dalam Ghozali (2002), instrumen penelitian dikatakan handal (*reliable*), jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Berdasarkan

Tabel 3, nilai *Cronbach Alpha* diketahui lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Selain itu dapat berarti konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan dapat dipercaya sebesar nilai *Cronbach Alpha* tersebut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

	Pearson	Cronbach Alpha
Pengetahuan Dewan	0.497 – 0.941	0.925
Pengawasan APBD	0.332 – 0.892	0.917
Akuntabilitas	0.397 – 0.959	0.941

Sumber: data olahan

Hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 4, menunjukkan hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki *inflation factor* (VIF) menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak satu pun variabel yang menunjukkan nilai VIF di atas 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel-variabel tersebut (Ghozali, 2002).

Nilai *tolerance* kurang dari 10%, yang berarti tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel-variabel tersebut. Hasil perhitungan *variance* memperlihatkan semua variabel independen untuk model penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dalam penelitian ini.

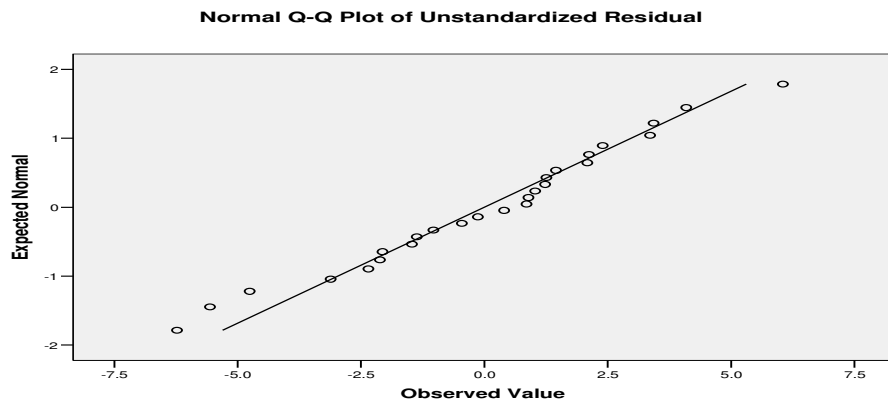
Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

	Tolerance	VIF	Sig (2-tailed)
Pengetahuan Dewan	0.006	162.377	0.039
Pengawasan APBD	0.013	79.235	0.184
Akuntabilitas	0.03	322.586	0.005

Sumber: data olahan

Salah satu cara untuk mengetahui normalitas data adalah dengan menggunakan *normal probability plot*. Hasil *normal probability plot* disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan hasil

tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas karena data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2002).



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: data olahan

Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sejauh mana pengaruh variabel independen (Pengetahuan Anggota legislatif Daerah Tentang Anggaran) terhadap variabel dependen

(Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) dapat dilihat pada Tabel 5 hasil perhitungan regresi linier sederhana sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Pengetahuan Anggota legislatif Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD

ANOVA					
Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	124.324	1	124.324	11.118	0.003
Residual	268.382	24	11.183		
Total	392.706	25			

- a. Predictors: (constant), X1
- b. Dependent Variable: Y

Sumber: data olahan

Hasil uji ANOVA atau F test didapat nilai Fhitung sebesar 11,118 dengan probabilitas 0,003. Karena probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dengan kata lain Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang

Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Berdasarkan perhitungan SPSS 13.0 dapat terlihat bahwa koefisien regresi pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran dan

pendapatan belanja daerah sebesar 0,632. Pada tabel selanjutnya diketahui nilai koefisien determinasi, *R Square* (R^2) sebesar 0,317 atau 31,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 31,7%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 68,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka nilai koefisien regresi (b_1) untuk analisis regresi sederhana ini adalah 0,632. Dengan taraf signifikansi untuk hipotesis pertama ini adalah 0,003. Koefisien regresi (b_1) yang didapatkan untuk hipotesis pertama ini lebih besar dari nol ($0,632 > 0$) serta taraf signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), maka hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima dan menolak H_0 . Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat Pengaruh dan signifikan antara Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran (X_1) terhadap

Pengawasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (Y).

Secara statistik dengan koefisien determinasi, *R Square* (R^2) sebesar 0,317 atau 31,7%, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 31,7%. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 68,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian maka pengetahuan akan memberikan dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kegiatan pengawasan.

Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating

Pengujian untuk hipotesis 2 menggunakan analisis persamaan regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*). Hasil pengujian tersajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji F Statistik (Uji Signifikansi Simultan) Akuntabilitas dalam Memoderasi Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan APBD

ANOVA					
Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	172.106	3	57.369	5.721	0.005
Residual	220.599	22	10.027		
Total	392.706	25			

- Predictors: (constant), X_1 , X_2 , X_3
- Dependent Variable: Y

Sumber: data olahan

Hasil uji ANOVA atau *F test* di dapat nilai Fhitung sebesar 5,721 dengan probabilitas 0,005. Karena probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa model yang digunakan

dapat dipakai untuk menjelaskan pengaruh variabel independen (pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran), dan variabel *moderating* (akuntabilitas) terhadap variabel dependen

(pengetahuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). Untuk menguji signifikansi pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran (Akuntabilitas) terhadap pengetahuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel *moderating* yaitu dengan menggunakan uji F. Dari hasil perhitungan diperoleh F hitung sebesar 5,721, sedangkan F tabel dengan α (0,05) adalah 3,05 dan \tilde{n} -value sebesar 0,005. Mengingat Fhitung > Ftabel dan \tilde{n} -value sebesar 0,005 masih lebih kecil dibandingkan 0,05, maka secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel *moderating*.

Pada tabel tersebut diketahui nilai koefisien determinasi, *R Square* (R²) sebesar 0,438 atau 43,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel moderating sebesar 43,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini

Berdasarkan analisis regresi dengan uji interaksi, didapat nilai koefisien regresi (d) untuk analisis regresi sederhana ini adalah -0,085. Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas tidak mampu memoderasi hubungan pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran dengan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada penelitian ini (Lampiran 2).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Pramono (2002) yang menyebutkan bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah

satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, di antaranya adalah akuntabilitas.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh antara Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kemampuan anggota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin baik. Secara parsial hipotesis kedua memiliki pengaruh yang signifikan dengan taraf signifikansi adalah 0,040. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan uji interaksi, disimpulkan bahwa H₀ diterima. Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut, maka akuntabilitas tidak memperkuat pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas subjek penelitian, mengubah atau menambah variabel lain misalnya komitmen politik, psikologi dewan, pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada komisi anggaran saja, namun diperluas di komisi lainnya, kemudian perlu dilakukan pengembangan instrumen penelitian yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari objek yang diteliti. Lingkup penelitian diperluas

di wilayah lain atau memperluas wilayah lain (regional) atau bahkan provinsi lainnya di

Indonesia. Supaya hasil penelitiannya dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. (2002). *Pengaruh Pengetahuan dan RPPS terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran (studi kasus pada PDRD seprovinsi Bengkulu)*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada
- Coryanata, I. (2007). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Govindarajan, A. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indradi, S. (2001). *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Tesis S2 Tidak di Publikasikan. Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya Malang.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kompas. (2011). Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Daerah. [Online]. Tersedia http://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=3393 [8 Ferbruari 2011].
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pramono, A. H. (2002). *Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis S2 Tidak di Publikasikan. Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
- _____. Peraturan Pemerintah. Nomor. 105/ 2000 yang telah berganti menjadi 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi (2009) [Online]. Tersedia http://bappeda.kabupatensukabumi.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=11&Itemid=5 [15 September 2011].
- Simson, W., Imam, G., & Nazir, M. (2007) *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi.
- Sopannah. (2003). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Sutarnoto, T. (2002). *Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai*, Tesis

S2 Tidak di Publikasikan. Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya Malang.

Truman, D. B. (1960). *The Governmental Process, Political Interest and Public Opinion*, Alfred

A Knof. New York: pp 333.

Yudono, B. (2002). *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela/jendela3.htm>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1. Jenis Kelamin:		
Laki-laki	26	100,00
Total	26	100,00
2. Usia:		
≤ 30 tahun	0	0,00
> 30 tahun	26	100,00
Total	26	100,00
3. Pendidikan Terakhir:		
SMA/ sederajat	6	23,07
D3	3	11,54
S1	14	53,85
S2	3	11,54
Total	26	100,00

Sumber: Data Penelitian (diolah kembali)

Lampiran 2: Analisis Regresi Sederhana dan Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.738	5.370		5.910	.000
	X1	.632	.189	.563	3.334	.003

a. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.563 ^a	.317	.288	3.34404

a. Predictors: (Constant), X1

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-110.033	65.889		-1.670	.109
	X1	5.603	2.286	4.991	2.451	.023
	X2	2.557	1.192	3.052	2.146	.043
	Moderating	-.089	.041	-6.252	-2.178	.040

a. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.662 ^a	.438	.362	3.16658

a. Predictors: (Constant), X1 Z, Z, X1